

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – buku

- Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan Pemberian Hak Atas Tanah Negara Seri Hukum Pertanahan Ii Sertifikat Dan Permasalahannya*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2002), hlm 1.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Edisi Revisi, Cetakan Ke-9*, (Jakarta:Djambatan 2003) hlm 23
- Boedi Harsono, Menuju *Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional dalam hubungannya dengan TAP MPR RI IX/MPR/2001*, (Jakarta:Universitas Trisakti, 2002), hlm. 3
- Boedi Harsono, *huku m agraria Indonesia sejarah pembentukan undang – undang pokok agraria isi dan pelaksanaannya* (Jakarta, djambatan, 2007) hlm 291
- Efendi Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia : Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1991), hlm. 259.
- Effendy Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 237
- G. Kartasapoetra, dkk, *Hukum Tanah, Jaminan bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta, PT. RinekaCipta, 1991, hlm. 7

- HERMAN HERMIT, 2004, *cara memperoleh sertifikat hak milik, tanah negara dan tanah penda teori dan praktek pendaftaran tanah di Indonesia*. mandar maju/2004/Bandung hlm 116-120
- Imam Sutiknjo, politik hukum agrarian (yogjakarta : Gajah Mada University press,1990) hlm 35
- John Salindeho, *Masalah Tanah Dalam Perkembangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993) Hal 171
- Kurnia Warman, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk*, Jakarta, 2012, hlm. 40
- Maria S.W. Sumardjono, 2008, *Tanah Dalam Persepektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 208
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Yuridika, Surabaya: 1993). hlm. 2.
- Ramli Zein, *Hak Pengelolaan Dalam Undang – undang Pokok Agraria* (Jakarta : Rineka Cipta, 1995) hlm 2
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *KUHPerdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2005, hlm. 381
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet.31 (Jakarta: Intermedia, 2003),hlm 94.
- S. ANDIWINATA,S.H 1997, *penuntut hukum agraria 1*.

Sudjito, *Prona Persertifikatan Tanah Secara Massal dan Penyelesaian Sengketa*

Tanah yang Bersih, Strategis, (Yogyakarta: Liberti, 1987), hlm 3

Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta 1981, hlm.

10.

Saim Aksinudin , *Hukum Pertanahan, Mengurai Kompleksitas Problem*

Pertanahan di Indonesia (Malang: inteligensia media, 2022) Hlm 58

Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2011),

hlm. 88

B. PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – undang no 5 tahun 1960 peraturan dasar pokok – pokok agraria.

Peraturan Pemerintah No. 40 dan No. 41 tahun 1959

peraturan mentri nomer : Per – 13/MBU/09/2014

TAP/MPR RI IX/MPR/2001

Putusan Mahkamah Konstitusi Konstitusi No. 001/ PUU-II/2003,

021/PUU-II/2003, dan 022/PUU-II/2003 dalam permohonan pengujian

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap

UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – undang no 5 tahun 1960 peraturan dasar pokok – pokok

agraria.pasal 16

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bngunan dan Hak Pakai Atas Tanah

Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Pasal 12 ayat 1

C. SUMBER LAINYA

<https://fahum.umsu.ac.id/hak-hak-atas-tanah-menurut-hukum-agraria/>

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/11TAHUN2010PP.HTM>

<http://etheses.uin-malang.ac.id/30704/>

<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/14769/5/BAB%20II.pdf>

<https://dspace.uii.ac.id>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57ea194b24b14/hak-guna-air>

<https://www.rumah.com/berita-properti/2016/8/132439/bisakah-hak-pakai-diubah-jadi-hak-milik>